



PENGDLAN AGMA
KOTA TASIKMALAYA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2
0
2
3

Jl. Letnan Harun, Kelurahan Sukarindik, kecamatan
Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151
Telp. (0265) 333000, Fax (0265) 7523520
Email: pa.kotatasikmalaya_ptabdg@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran tahunan dari perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) yang tertuang dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berperan sebagai alat kendali, dan wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam tujuan tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan tidak terbatas hanya dokumen tertulis saja, namun diharapkan dapat meningkatkan komitmen serta semangat bagi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mewujudkan target-target yang sudah ditetapkan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan pembangunan aparatur dan perwujudan tata Kelola peradilan kearah yang lebih baik.

Kota Tasikmalaya, 20 Desember 2022

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

H. Mahrus, Lc., M.H.





RENCANA KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	96%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%
		d. Index Presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%
		c. Persentase pendaftaran online melalui e-Court	50%
		d. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	2%
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan secara Prodeo	95%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Pengadilan	Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%

Kota Tasikmalaya, 20 Desember 2022



H. Mahrus Lc., M.H.
NIP. 19710104.200502.1.001

STRATEGI RENCANA KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA KELAS IB

No	SASARAN STRATEGIS		Target	STRATEGI		Anggaran
	Sasaran	Indikator		Kegiatan	Output	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodic terhadap tingkat penyelesaian perkara b. Penerimaan Pemeriksaan Perkara sesuai Bindalmin	a. Hasil monitoring dan evaluasi rekomendasi Langkah-langkah percepatan penyelesaian perkara b. Tertib pelaksanaan penerimaan pemeriksaan perkara	Biaya panja biaya perkara yang dibayarkan pihak
	b. Persentase perkara yang upaya tidak mengajukan hukum Banding	96%		a. Pelaksanaan hukum secara rutin untuk meningkatkan kualitas putusan b. Meningkatkan akses terhadap putusan	a. Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya berkualitas b. Kemudahan akses masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya	Biaya Anggaran DIPA sebagai pendukung
	c. Persentase perkara yang upaya tidak mengajukan hukum Kasasi	96%				
	d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%		a. Melakukan survey kepada masyarakat b. Mengevaluasi dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil survei periode sebelumnya	a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat b. Rekomendasi tindaklanjut / perbaikan atas hasil survei sebelumnya	Biaya anggaran DIPA sebagai pendukung
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;	100%	a. Mengoptimalkan tenaga Jurusita / Jurusita Pengganti; b. Mengusulkan pegawai untuk direkomendasi	a. Penambahan jumlah tenaga Jurusita / Jurusita Pengganti. b. Laporan hasil monev.	Biaya penyelesaian perkara dari para pihak.

		menjadi Jurusita / Jurusita Pengganti.		
		c. Monitoring dan evaluasi atas kinerja Jurusita / Jurusita Pengganti.		
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	<p>a. Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator</p> <p>b. Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi</p> <p>c. Mengusulkan Hakim yang bersertifikat mediator</p> <p>d. Menyiapkan instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi</p> <p>e. Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi</p> <p>f. Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi</p> <p>g. Memberikan penghargaan kepada mediator dengan keberhasilan mediasi tertinggi</p>	<p>a. Membuat SK dan Daftar Mediator</p> <p>b. Publikasi Mediator</p> <p>c. Usulan Diklat Sertifikasi Mediator</p> <p>d. Instrumen Penunjang Mediasi</p> <p>e. Ruang Mediasi yang representative</p> <p>f. Laporan pelaksanaan Mediasi</p> <p>g. Penghargaan bagi Mediator</p>	<p>Biaya Anggaran DIPA untuk dukungan sarpras.</p> <p>Biaya DIPA untuk dukungan Sarpras</p>

	b. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	2%	a. Melakukan sosialisasi e-Court kepada kuasa hukum / pengacara dan masyarakat menjalani Kerjasama sosisialisasi dengan pemerintah daerah b. Membuat pojok e-Court dan menetapkan petugas pojok e-Court c. Memfasilitasi tergugat/terlawan pihak atau kuasa hukum dari perkara e-Court untuk bersidang secara elektronik	a. Dokumentasi Sosialisasi b. Pojok e-Court	Biaya DIPA dukungan Sarpras
3	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%	a. Mensosialisasikan program pembebasan perkara b. Menerima permohonan pembebasan perkara c. Mengevaluasi pelaksanaan prodeo	a. Dokumentasi sosialisasi bantuan biaya b. Permohonan pembebasan perkara c. Hasil pelaksanaan perkara	DIPA 04 biaya evaluasi
	3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	a. Pengumuman pengadaan Aplikasi SIRUP b. Pengadaan/seleksi jasa konsultasi Posbakum c. Pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum d. Mengevaluasi pelaksanaan layanan bantuan hukum melalui Posbakum.	a. Rencana melalui Pengadaan Pengadaan/ b. Dokumen Seleksi c. Kontrak Pemberian Layanan Posbakum d. Hasil evaluasi layanan Posbakum	Umum DIPA 04

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%	a. Mendata putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap b. Menginformasikan kepada para pihak agar putusan yang eksekutabel yang telah berkekuatan hukum tetap agar segera diajukan eksekusi.	a. Daftar Perkara BHT b. Akta Cerai	-
---	--	--	-----	--	--	---

